



DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG

RENSTRA

2021 - 2026

SEMARANG
Semakin **HEBAT!**



Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 - 2026

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 - 2026**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Pertanian Kota Semarang dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang pertanian . Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pertanian bagi Pemerintah Kota Semarang secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang pertanian yang lebih baik di Kota Semarang. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Pertanian Kota Semarang, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang pada khususnya, sehingga pembangunan di Kota Semarang dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Semarang,.....*September*..... 2021

Kepala Dinas Pertanian
Kota Semarang



[Signature]
Drs. Hernowo Budi Luhur, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196609011986031004

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kota Semarang	II-5
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	III-4
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian	III-5
3.4. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	III-8
3.5. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	III-8
3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-8
3.7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-10
3.8. Penentuan Isu - Isu Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang	III-12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Semarang	IV-1

BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
	5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Semarang	V-1
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	VI-1
	6.1 Rencana program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah, yaitu sebagai penyedia bahan pangan penduduk, penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, serta berkontribusi dalam pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Pertanian menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Di lain pihak peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan menuntut adanya peningkatan kualitas produk pertanian.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan

berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian Kota Semarang maka Dinas Pertanian wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pertanian agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang 2021-2026 merupakan dokumen yang memberikan arah pembangunan pertanian di Kota Semarang selama tahun 2021-2026. P-Renstra ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2020 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan
 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
 18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016–2021 disusun dengan maksud untuk memberikan dasar bagi seluruh *stakeholder* bidang pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026.

Dapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang pertanian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;

3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinasxxx yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Pertanian yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang; Dinas Pertanian Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang mempunyai fungsi:

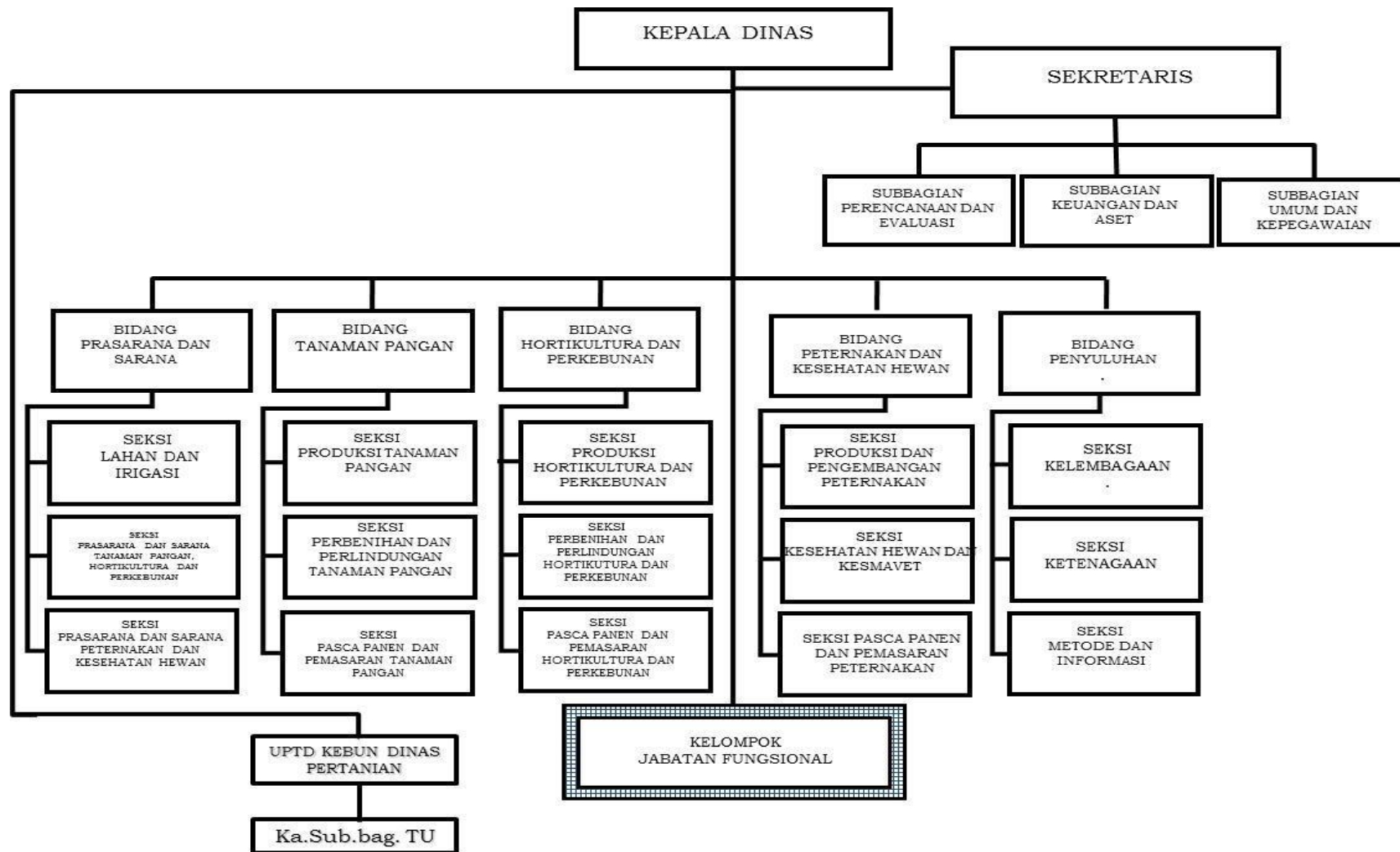
1. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan bidang penyuluhan;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Penyelenggaraan kerjasama bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan bidang penyuluhan;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertanian;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;

10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kota Semarang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.
2. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang prasarana dan sarana, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, dan UPTD. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi lahan dan irigasi, seksi prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, dan seksi prasarana peternakan dan kesehatan hewan. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
 - 1) Seksi Lahan dan Irigasi
 - 2) Seksis Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 3) Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi tanaman pangan, seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, dan seksi pascapanen dan pemasaran tanaman pangan. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Tanaman Pangan.
5. Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi hortikultura dan perkebunan, seksi

perbenihan dan perlindungan hortikultura dan perkebunan, dan seksi pascapanen dan pemasaran hortikultura dan perkebunan. Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:

- 1) Seksi Produksi Hortikultura dan Perkebunan;
 - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Hortikultura dan Perkebunan.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi produksi dan pengembangan peternakan, seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan seksi pascapanen dan pemasaran peternakan. Bidang peternakan dan Kesehatan hewan terdiri dari:
- 1) Seksi Produksi Produksi dan Pengembangan Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3) Seksi Pascapanen dan Pemasaran Peternakan.
7. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi kelembagaan, seksi ketenagaan, dan seksi metode dan informasi. Bidang Penyuluhan terdiri dari:
- 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Ketenagaan; dan
 - 3) Seksi Metode dan Informasi.
8. UPTD Kebun Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Kota Semarang

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pertanian Kota Semarang di klasifikasikan berdasarkan pendidikan dan berdasarkan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	12	-	12
2	SMP Sederajat	-	-	5	-	5
3	SMA Sederajat	3	1	28	2	34
4	Diploma	10	5	2	4	21
5	S1	15	22	12	10	59
6	S2	4	11	-	1	16
7	S3	-	-	-	-	-
		32	39	59	17	147

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang per Januari 2021 (data diolah)

Dari jumlah pegawai ASN sebanyak 71 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	5	2	7
2	Golongan III	24	31	55
3	Golongan IV	3	6	9

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang per Januari 2021 (data diolah)

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pertanian Kota Semarang berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Nama bidang barang	Jumlah barang	Satuan barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah	20	bidang	36,390,824,800	Luas total : 338.168 m2
2	Peralatan dan mesin	1.496	unit	10,156,087,374	
	Alat-alat besar	16	unit	450,533,785	
	Komputer	182	unit	1,154,778,866	
	Rambu-Rambu	3	unit	313,210,000	
	Alat-alat angkutan	81	unit	2,444,522,002	Mobil : 12 unit, Motor roda 2 : 45 unit, Motor roda 3 : 4 unit Gerobak : 22
	Alat bengkel dan alat ukur	11	unit	101,796,988	
	Alat pertanian	138	unit	1,811,785,159	
	Alat kantor dan rumah tangga	805	unit	2,144,732,100	
	Alat studio dan alat komunikasi	66	unit	525,142,041	
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	15	unit	30,425,000	
	Alat laboratorium	173	unit	1,152,352,223	
	Alat-alat persenjataan/ keamanan	6	unit	26,809,210	
3	Gedung dan bangunan	69	unit	21,814,121,980	
	Bangunan Gedung	69	unit	21,814,121,980	
4	Jalan. Irigasi dan bangunan	87	unit	14,122,921,801	
5	Aset tetap lainnya	5501	unit	1,403,152,575	
	Buku dan perpustakaan	8	buah	260,680,000	
	Barang bercorak kebudayaan	1	buah	2,480,000	
	Hewan dan ternak serta tanaman	5490	macam	802,180,575	
6	Konstruksi dalam pengerjaan		unit	7,777,000	
	DED		unit	7,777,000	
7	Aset lainnya	73	unit	98,346.212	
	Peralatan dan Mesin Rusak	73	unit	98,346,212	
	Jumlah			83,993,231,742	

Sumber : Dinas Pertanian (data diolah)

Aset yang dimiliki Dinas Pertanian Kota Semarang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan dinas dan hewan-hewan ternak, sedang aset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya serta tanaman yang berada di kantor dinas, klinik hewan dan UPTD Kebun Dinas yang tersebar di beberapa kecamatan. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja.

Sebagai salah satu UPTD Dinas Pertanian Kota Semarang, UPTD Kebun Dinas mengelola 13 lokasi kebun dinas yang tersebar di beberapa kecamatan. UPTD Balai Benih Pertanian berkantor di Jl. R.M. Hadi Soebeno 7, Kel. Tambangan Kec. Mijen. Komoditas yang di usahakan antara lain hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan pengolahan hasil pertanian. Lokasi dan jumlah tanaman yang ada di kebun pada wilayah kerja UPTD Kebun Dinas Pertanian adalah sebagai berikut:

Rincian lokasi, luas lahan dan komoditas yang diusahakan pada masing-masing kebun dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4.
Lokasi, luas lahan dan komoditas pada Kebun Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
1	Kebun Purwosari A Kel. Purwosari Kec. Mijen	2,08 Ha	Durian	103	2009	Masa Produksi
			Kelengkeng	59	2009	Masa Produksi
			Jambu kristal	290	2009	Masa Produksi
			Sirsat madu	17	2009	Masa Produksi
			Jambu citra	2		Masa Produksi
			Mangga	2		Masa Produksi
			Jeruk	186		Awal Produksi
2	Kebun Purwosari B Kel. Purwosari Kec. Mijen	1,49 Ha	Durian	59	2010	Masa Produksi
			Sukun	17	2010	Masa Produksi
			Jambu kristal	248	2010	Masa Produksi
			Petai	2	2010	Masa Produksi
			Sirsat	4	2010	Masa Produksi
			Jambu citra	89		Masa Produksi
			Jambu jamaika	27		Masa Produksi
Jeruk	228		Awal Produksi			
3	Kebun Purwosari C Kel. Purwosari Kec. Mijen	0,8 Ha	Kelengkeng	112	2012	Masa Produksi
			Jambu kristal	150	2012	Masa Produksi

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
4	Kebun Purwosari D Kel. Purwosari Kec. Mijen	1,06 Ha	Durian Jeruk buah Jambu kristal	3 155 103		Masa Produksi Awal Produksi Awal Produksi
5	Wates Kel. Wates Kec. Ngaliyan	5,5 Ha	Kelengkeng Jambu Kristal	297 613	2011 2011	Masa Produksi Masa Produksi
6	Kebun Bubakan Kel. Bubakan Kec. Mijen	2 Ha	Kelengkeng Jambu kristal Durian Sirkaya Mangga Sirsak	91 441 4 7 2 19	2011 2011 2011 2011 2011	Masa Produksi Masa Produksi Mulai Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi
7	Gunungpati Kel. Gunungpati Kec. Gunungpati	1,2 Ha	Durian Kelengkeng Jambu kristal Sirsat madu Jambu merah Mamesapote Jambu Air Plum Jeruk Nipis Nangka Srikaya Belimbing	11 82 109 29 18 3 5 1 4 1 4 6	2009 2009 2010 2010 2010	Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Mulai Produksi Mulai Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi
8	Plalangan Kel. Plalangan Kec. Gunungpati	10 Ha	Durian Jeruk Siam Jeruk Pamel Merah Jeruk Pamel Jambu Kristal Cengkeh Kakao	111 110 134 49 195 5 200		Masa Produksi Belum Produksi Belum Produksi Belum Produksi Mulai Produksi Belum Produksi
9	Cepoko Kel. Cepoko Kec. Gunungpati	3,2 Ha	Kelengkeng Jambu kristal Sirsat madu Durian Jambu air Mangga Nangka Rambutan Srikaya Belimbing	238 416 118 37 18 28 6 6 16 3	2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010	Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi
10	Nongkosawit Kel. Nongkosawit Kec. Gunungpati	1,5 Ha	Kelengkeng Jambu kristal Grand Anona	110 19 4	2010 2010 2010	Masa Produksi Masa Produksi Masa Produksi
11	Kramas Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik	2 Ha	Kelengkeng Jambu kristalin	97 221	2011 2011	Masa Produksi Masa Produksi

No	Lokasi Kebun	Luas Lahan (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (btg)	Tahun perolehan	Keterangan
12	Tambangan Kel. Tambangan Kec. Mijen	1,5 Ha	Indukan anggrek dendrobium (2011)	8	2011	Tidak produksi
		2,3 ha	Indukan anggrek bulan (2011)	27	2011	Tidak produksi
			Indukan anggrek dendrobium (2012)	29	2011	Tidak produksi
			Indukan anggrek bulan (2012)	17	2012	Tidak produksi
			Anggrek dendrobium		2012	Sudah Produksi
			Anggrek remaja		2012	Sudah Produksi
			Anggrek dendrobium		2012	Sudah Produksi
			Jambu citra	18	2009	Masa Produksi
			Anggrek dendrobium (2011)	1.723	2011	Kurang Produksi
			Anggrek dendrobium remaja	341	2011	Sudah Produksi
			Anggrek dendrobium (2012)	748	2012	Kurang Produksi
				0,8 ha	Anggrek bulan	289
Anggrek dendrobium dewasa	512				2012	Sudah Produksi
Sawah						Sudah Produksi
13	Cangkiran Kel. Cangkiran Kec. Mijen	1,2 Ha	Padi			Sudah Produksi
14	Mangunsari Kecamatan Gunungpati	0,8 ha	Rambutan	10		Masih Produksi

Sumber : Dinas Pertanian (data diolah)

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di UPTD Kebun Dinas Pertanian maka diperlukan sarana prasarana. Sarana prasarana yang ada di UPTD Kebun Dinas antara lain:

- a. Kendaraan operasional :
 1. Kendaraan bermotor roda 4 : 1 unit pick up
 2. Kendaraan bermotor roda 3 : 4 unit (3 unit rusak; 1 unit baik)
 3. Kendaraan bermotor roda 2 : 7 unit
- b. Alat dan mesin pertanian
 1. Hand traktor : 2 unit
 2. Traktor roda 4 : 2 unit (1 unit rusak; 1 unit baik)
 3. Generator : 2 unit
 4. Mesin pemotong rumput : 14 unit
 5. Culltivorator : 1 unit
 6. APPO : 2 unit
 7. Sprayer : 20 unit
 8. Alat Pengering padi : 1 unit
 9. Laminar Flow : 3 unit (1 unit rusak; 2 unit baik)
 10. Sprinkle anggrek : 1 unit (rusak)
 11. Springkle sayur : 1 unit (rusak)
 12. Mis blower : 3 unit
 13. Blower padi : 1 unit (rusak)
 14. Pres plastic : 1 unit
 15. Shaker : 4 unit (2 unit baik; 2 unit rusak)
 16. Pompa air : 6 unit
 17. Autoklaf : 2 unit

Lokasi Kantor Dinas Pertanian Kota Semarang yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pertanian Kota Semarang. Lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kota Semarang di Gedung Mr. Moch. Ikhsan Jl. Pemuda memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Pertanian Kota Semarang.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan pilihan pertanian yang disajikan pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kota Semarang Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)					Capaian RPJMD 2016-2021 (%)	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019		2020
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
2	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
3	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
4	Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian				33	38	43	48	53	58	33	38	43	48	53	100	100	100	100	100	91,38
5	Jumlah Produksi pertanian				54.978	55.312	55.642,00	55.978,00	56.317,00	56.657,00	54.978,09	55.493,91	50.897,33	51.696,26	51.365,34	100,00	100,33	91,47	92,35	91,21	90,66
6	Produksi tanaman pangan (Ton)				44.162,00	44.382,00	44.604,00	44.826,00	45.051,00	45.276,00	44.162,00	44.537,34	39.792,10	37.898,56	34.376,31	100,00	100,35	89,21	84,55	76,31	75,93
7	Produksi tanaman hortikultura				10.568,00	10.672,00	10.778,00	10.887,00	10.996,00	11.106,00	10.568,00	10.695,57	10.854,00	13.540,60	16.729,60	100,00	100,22	100,71	124,37	152,14	150,64
8	Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton)				248	258	260	265	270	275	248	261	251,23	257,1	273,4	100,00	101,16	96,63	97,02	101,26	99,42
9	Jumlah produksi pertanian perkotaan				300	1.260	2.220	3.180	4.140	5.100	300	1.350	2.312	3.886	4.600	100,00	107,14	104,14	122,20	111,11	90,20
10	Jumlah kasus penyakit hewan menular				36	36	32	29	26	26	36	36	30	27	14	90	100	93,75	93,1	146,15	146,15
11	Jumlah produksi hasil peternakan				30.818,14	33.183,47	33.597,67	34.017,44	34.442,86	34.874,01	30.818,14	33.325,60	33.702,67	37.346,62	35.045,70	100,00	100,43	100,31	109,79	101,75	100,49
12	Produksi daging				-	20.585,04	20.790,89	20.998,80	21.208,79	22.269,23	21.099,37	21.268,18	21.554,07	24.966,139	22.874,53	-	103,32	103,67	118,89	107,85	102,72
13	Produksi telur				-	8.724,37	8.855,24	8.988,07	9.122,89	9.579,03	6.224,90	8.443,73	8.432,00	8.610,523	8.506,71	-	96,78	95,22	95,80	93,25	88,81
14	Produksi susu				-	3.874,06	3.951,54	4.030,57	4.111,18	4.316,74	3.493,87	3.613,695	3.615,001	3.769,958	3.664,47	-	93,28	91,48	93,53	89,13	84,89
15	Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV)				5	7	9	9	9	9	5	7	9	14	14	100,00	100,00	100,00	155,56	155,56	155,56

Bab II Gambaran Pelayanan
Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)					Capaian RPJMD 2016-2021 (%)	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019		2020
16	Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi				13	14	16	19	21	24	13	14	18	19	24	100,00	100,00	112,50	100,00	114,29	100,00
17	Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kel)				5	21	37	53	69	85	5	21	37	66	91	100,00	100,00	100,00	124,53	131,88	107,06
18	sentra produk unggulan pertanian (kawasan)				0	2	2	3	4	4	-	2	2	3	3	-	100,00	100,00	100,00	75,00	75,00
19	jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi				2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
20	Luas tanaman pangan organik				2	2,5	5	8	10	13	2	4	10	10	14	100,00	160,00	200,00	125,00	140,00	107,69

Sumber : Dinas Pertanian (data diolah)

Dari Tabel 2.5 dapat diketahui rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021 sudah tinggi yaitu 103,53%. Angka tersebut angka rata-rata yang diperoleh dengan cara membandingkan realisasi pencapaian tahun 2020 dengan nilai target tahun 2021.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 19 indikator kinerja yang ditetapkan tahun 2016-2021, 12 indikator diantaranya memiliki nilai pencapaian yang tinggi (di atas 100%), sedangkan 8 indikator lainnya memiliki nilai capaian dibawah 100 %. Kedelapan indikator tersebut antara lain jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian, produksi pertanian, produksi tanaman pangan, produksi tanaman perkebunan, jumlah produksi pertanian perkotaan, produksi telur, produksi susu, dan sentra produk unggulan pertanian. Pada indikator jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian, nilai capaiannya dibandingkan dengan target tahun 2021 adalah 91,38%. Hal ini disebabkan target pada tahun 2021 dinaikkan sebesar 9,4 % dibandingkan tahun 2020. Namun apabila melihat capaian realisasi pada akhir tahun 2020 sebesar 100%, maka besar kemungkinan pada akhir tahun 2021 jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian dapat tercapai 100%. Sebagian kelompok tani telah melakukan diversifikasi komoditas atau jenis usaha pertaniannya dan telah melaksanakan penanganan pasca panen walaupun masih dalam skala kecil. Kelompok tani juga telah memanfaatkan sosial media dan media online lainnya dalam mempromosikan produknya.

Indikator kinerja lain yang nilai capaiannya di bawah 100% adalah indikator produksi pertanian. Pada capaian indikator antara realisasi tahun 2020 dengan target 2021 diperoleh hasil sebesar 90,66%. Hal ini tidak berbeda jauh dengan capaian realisasi tahun 2020, yaitu 91,21%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi pertanian sampai akhir tahun 2021 akan sulit untuk mencapai nilai di atas 100 %. Produksi pertanian yang turun adalah produksi tanaman pangan yang pencapaiannya hanya 76,31% pada tahun 2020 dan pencapaian tersebut tidak berbeda jauh dengan perbandingan target tahun 2021 dan realisasi 2020, yaitu 75,93%. Tidak berhasilnya pencapaian indikator produksi pertanian tersebut disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kekeringan pada lahan sawah yang menyebabkan jadwal tanam mundur.
- b. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan alih komoditas.
- c. Sebagian besar petani belum menggunakan benih unggul bersertifikat sehingga menyebabkan produktivitas rendah.

Jumlah produksi tanaman perkebunan merupakan penunjang indikator produksi pertanian, dimana pencapaian kinerjanya pada tahun 2020 mencapai 101,26%. Namun apabila dibandingkan dengan target 2021, maka capaian kinerjanya masih dibawah 100%, yaitu sebesar 99,42%. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2021, kinerja produksi tanaman perkebunan dapat tercapai 100%. Kendala yang sering ditemui adalah tanaman perkebunan terutama kelapa banyak yang ditebang sebagai bahan bangunan dan tidak ditanami kelapa lagi serta lahan tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan non pertanian. Selain itu juga karena adanya serangan hama kumbang kelapa (*Oryctesrhinoceros*) pada tingkat massif di beberapa kecamatan sentra produksi kelapa.

Pada indikator jumlah produksi pertanian perkotaan, pencapaian kinerja pada tahun 2020 dapat tercapai lebih dari 100% yaitu 111,11%, sedangkan pada perbandingan target tahun 2022 dengan realisasi 2020 pencapaiannya sebesar 90,20%. Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah produksi pertanian perkotaan dapat terealisasi melebihi dari target yang ditentukan mengingat kegiatan fasilitasi pertanian perkotaan untuk kelompok-kelompok tani terus ditingkatkan.

Indikator kinerja lainnya yang memiliki capaian kurang dari 100% adalah produksi telur dan produksi susu. Kedua indikator tersebut merupakan komponen dalam indikator kinerja jumlah produksi hasil peternakan. Secara umum indikator jumlah produksi hasil peternakan menunjukkan pencapaian lebih dari 100%, baik pencapaian tahun 2020 sebesar 107,85% maupun perbandingan target kinerja tahun 2021 dengan realisasi 2020 yaitu sebesar 100,49%. Namun pada komponen kinerja produksi telur dan susu menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut masih dibawah 100 % dan pada tahun 2021 akan sulit untuk mencapai target yang ditentukan mengingat pencapaian pada tahun 2020 juga dibawah 100%, yaitu 92,35% dan 89,13%. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan produksi peternakan tersebut disebabkan antara lain : (a) harga pakan ternak/konsentrat naik sehingga peternak kurang memiliki daya beli, akibatnya asupan zat gizi penunjang produksi susu dan telur berkurang. (b) akibat dari harga pakan naik, sebagian ternak dijual karena tidak ada dana untuk membeli pakan sehingga karena jumlah ternak yang memproduksi susu dan telur menurun yang berakibat produksi susu dan telur menurun. (c) permintaan terhadap susu dan telur menurun dari masyarakat terutama dari hotel, restoran, warung dan katering sehingga peternak mengurangi ternak yang pelihara. (d) masa produksi ayam sudah turun dan tidak bisa memasukkan bibit ayam baru karena harga bibit ayam pedaging cukup tinggi sehingga jumlah ayam pedaging yang dipelihara juga menurun, (e) adanya pandemi covid-19 pada awal tahun

2020 menyebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap produk-produk peternakan terutama produk telur dan susu.

Indikator kinerja terakhir yang pencapaiannya masih dibawah 100% adalah sentra produksi unggulan pertanian. Sesuai target tahun 2020 dan 2021, maka jumlah kawasan yang digunakan untuk sentra unggulan produksi unggulan pertanian adalah 4 kawasan, yaitu Agro Cepoko, Agro Purwosari, Agro Plalangan dan AgroWates. Namun pada tahun 2020 jumlah sentra produksi tersebut tidak dapat tercapai dikarenakan adanya pandemic Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan Pemerintah Kota Semarang harus melakukan *refocusing* anggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan sentra tersebut hanya tercapai 3 kawasan dari target 4 kawasan (75%). Namun diharapkan pada tahun anggaran 2021, target kawasan sentra produksi unggulan pertanian dapat tercapat sebanyak 4 lokasi.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian Kota Semarang

Dalam pencapaian target kinerja pelayanan perlu didukung pendanaan yang memadai agar program dan kegiatan dapat berjalan lancar. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan perencanaan dan penganggaran yang cermat dan tepat sasaran. Dari Tabel 2.6 terlihat bahwa selama kurun waktu 2016-2020 Secara umum kinerja keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang selama periode 2016-2020 ratio antara realisasi dan anggaran relatif tinggi yaitu 97,06%. Hal ini dimungkinkan karena selain pendanaan dari APBD Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang juga mendapat alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Dekonsentrasi maupun dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Akibat adanya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2020 anggaran pelaksanaan kegiatan banyak yang di-*refocusing* untuk dialihkan menjadi anggaran tanggap bencana penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Capaian kinerja keuangan Dinas Pertanian selama periode 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang Periode 2016-2020

NO	Program	Anggaran pada Tahun ke (Rp. 000.000)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Rp. 000.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.840,06	20.690,69	17.243,69	19.261,73	13.100,35	8.494,62	20.143,14	17.079,62	18.668,22	12.713,64	96,09	97,35	99,05	96,92	97,05	15.827,30	15.419,85
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.609,51	16.508,80	7.036,69	27.290,33	6.167,26	3.375,37	16.165,72	6.669,96	26.634,07	6.092,96	93,51	97,92	94,79	97,60	98,80	12.122,52	11.787,62
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.005,00	2.102,12	1.875,15	1.740,50	460,17	1.926,00	2.063,35	1.834,45	1.720,75	460,17	96,06	98,16	97,83	98,87	100,00	1.636,59	1.600,94
4	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	7.790,00	9.742,65	2.850,50	2.641,60	3.298,05	7.556,58	9.618,04	2.843,25	2.620,18	3.298,05	97,00	98,72	99,75	99,19	100,00	5.264,56	5.187,22
5.	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	163.622,03	55.514,69	110.039,49	49.478,49	19.676,92	156.057,55	54.580,47	109.782,66	47.218,30	19.639,96	95,38	98,32	99,77	95,43	99,81	79.666,32	77.455,79
6.	Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak	2.530,00	1.749,17	2.389,38	2.227,79	1.535,13	2.516,37	1.723,15	2.381,28	2.227,79	1.535,12	99,46	98,51	99,66	100,00	100,00	2.086,29	2.076,74
7.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	17.756,37	1.749,17	28.078,46	9.607,34	24.655,04	17.487,88	1.723,15	27.961,14	9.560,02	24.655,04	98,49	98,51	99,58	99,51	100,00	16.369,28	16.277,45
8	Program Pengembangan Sdm Pertanian	7.475,00	509,00	5.974,69	3.547,26	3.593,47	7.375,00	503,05	5.974,69	3.457,16	3.593,47	98,66	98,83	100,00	97,46	100,00	4.219,88	4.180,67
9	Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak	1.403,59	2.288,85	1.323,23	74,18	556,76	1.389,59	2.277,61	1.291,12	37,22	556,76	99,00	99,51	97,57	50,18	100,00	1.129,32	1.110,46
10	Program Pengembangan Pertanian Perkotaan				7.434,21	15.057,33				7.430,42	13.899,96				99,95	92,31	11.245,77	11.245,77
11	Program Penjamin Bahan Asal Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	3.614,00	110,00				3.607,00	101,04				99,81	91,85				1.862,00	1.858,50

Sumber : Dinas Pertanian (data diolah)

Dari sisi pendapatan, Dinas Pertanian Kota Semarang mendapatkan pendapatan dari penjualan hasil-hasil pertanian dan peternakan. Tabel 2.7 di bawah ini memperlihatkan kinerja pendapatan Dinas Pertanian Kota Semarang selama kurun waktu 2016-2020. Kinerja pendapatan rata-rata Dinas Pertanian Kota Semarang masih relatif tinggi yaitu 127,09% per tahun. Pencapaian kinerja pendapatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh harga komoditas peternakan yang tinggi pada saat dijual serta menambahkan produksi kebun-kebun Dinas Pertanian dengan mulai produktifnya tanaman-tanaman buah tahunan. Namun demikian, pada tahun 2020 terdapat penurunan baik target maupun realisasinya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Kota Semarang, yang mengharuskan adanya penurunan target pendapatan menyesuaikan dengan turunnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat akibat pandemi tersebut.

Tabel 2.7.
Realisasi Pendapatan Dinas Pertanian Kota Semarang 2016-2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	LEBIH/ KURANG
1	2016	658.750.000	1.242.944.501	584.194.501
2	2017	1.050.754.064	1.342.848.230	292.094.166
3	2018	1.369.634.797	1.561.597.171	191.962.374
4	2019	1.272.305.000	1.300.414.700	899.165.700
5	2020	1.061.825.000	1.091.096.440	29.271.440

Sumber : Dinas Pertanian (data diolah)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan *resource based activity* yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/ lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kota Semarang mempunyai potensi yang sangat besar di bidang agribisnis terutama pada sektor hilir (off farm). Walaupun demikian pembangunan pertanian di sektor hulu pun harus dipertahankan sesuai dengan potensi wilayah Kota Semarang guna menunjang pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah secara geografis Kota Semarang terletak pada 6°51' - 7°10' LS (Lintang Selatan) dan 109°50' – 110°35' BT (Bujur Timur). Pada

umumnya topografis Kota Semarang bergelombang dengan ketinggian antara 0,75 m sampai dengan 348 m dpl. Keadaan ini membagi Kota Semarang menjadi 2 daerah, yaitu Semarang Atas yang merupakan dataran tinggi dan Semarang Bawah yang merupakan dataran rendah. Iklim Kota Semarang masuk dalam kategori tropis lembab (Humids Tropios) dan Heternik dengan ciri-ciri banyak mengandung air dan kelembabannya relatif tinggi. Sedangkan jenis tanah bervariasi dari mediteran, latosol, alluvial, grumusol, dan regusol. Dengan demikian secara agroiklimat Kota Semarang memiliki potensi untuk dikembangkan komoditas-komoditas pertanian baik komoditas dataran rendah maupun dataran tinggi.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Semarang.
- b. Resiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Semarang relatif tinggi dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Tengah.
- c. Mudahnnya produk pertanian dari luar masuk ke Kota Semarang dengan harga yang bersaing.
- d. Perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap kontinuitas, kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan peternakan
- e. Infrastruktur pertanian seperti sumber-sumber air untuk irigasi beserta jaringan, jalan pertanian, dan kelembagaan pertanian belum optimal.
- f. Praktek pertanian konvensional yang mengandalkan input produksi berbasis bahan kimia anorganik.
- g. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders/pelaku usaha dan terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian.
- h. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.

- i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pertanian Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Meningkatnya konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) di tingkat masyarakat.
- b. Pasar komoditas pertanian yang terbuka luas terutama dengan adanya pasar bebas Asia (MEA).
- c. Peluang investasi dibidang pertanian meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak di agribisnis
- d. Berkembangnya pola kemitraan usaha agribisnis antara petani dg pengusaha/produsen
- e. Peningkatan intensifikasi pertanian dengan menerapkan Sapta Usaha Tani melalui *Good Agricultural Practice* (GAP) dan Standard Operasional Prosedur (SOP).
- f. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk pengembangan infrastruktur pertanian sehingga mengurangi beban SKPD Kota Semarang.
- g. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk pengamanan usaha tani.
- h. Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- i. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
- j. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- k. Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk petani Kota Semarang.
- l. Pengembangan fungsi kebun dinas sebagai sentra kawasan pertanian terpadu dengan fungsi produksi, edukasi, penelitian, serta wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pengembangan pertanian di Kota Semarang.
- m. Penerapan peraturan tentang tata ruang dan penetapan peraturan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif.
- n. Pengembangan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga

diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian.

- o. Diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kota Semarang.

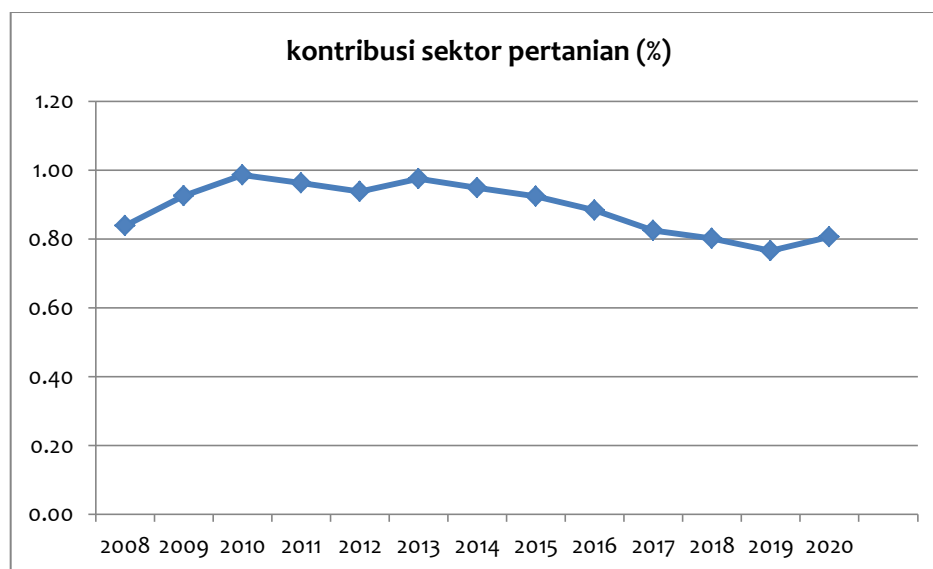
Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pertanian Kota Semarang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah, yaitu sebagai penyedia bahan pangan bagi penduduk, penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan serta kontribusi dalam pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Besarnya sumbangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan selama ini menunjukkan kontribusi yang positif berdasarkan harga konstan. Namun demikian dilihat dari laju pertumbuhan tiap sektor pembentuk PDRB atas dasar harga konstan tahun 2008–2020, sejak tahun 2015 sudah mulai menunjukkan kecenderungan atau trend menurun.

Gambar 3.1
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Semarang
Atas Dasar Harga Berlaku



Sumber : BPS Kota Semarang 2008-2020 (data diolah)

Meskipun nilainya menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, tetapi dari segi kontribusinya terhadap PDRB menunjukkan trend yang menurun sejak tahun 2010. Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemic covid-19 sektor pertanian justru bisa tumbuh positif dengan kenaikan yang cukup signifikan sebesar 5,18% dibandingkan tahun 2019 di saat lesunya pertumbuhan sektor-sektor yang lain.

Bukan persoalan mudah untuk mempertahankan sektor pertanian ini di lingkungan perkotaan. Berdasarkan perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) luas kawasan pertanian tanaman pangan sebesar 3.056 Ha. Dalam perubahan RTRW tahun 2019 luasnya turun menjadi 2.893 Ha, atau berkurang sebanyak 163 Ha. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kebutuhan lahan untuk kepentingan hunian maupun kepentingan lainnya memberikan konsekuensi berkurangnya kawasan pertanian tanaman pangan yang cukup banyak. Yang pada gilirannya apabila tidak diantisipasi akan juga menurunkan hasil produksi pertanian.

Berdasarkan data BPS Kota Semarang tahun 2017, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian petani sebanyak 45.961 atau sebesar 6,65 %, yang terdiri dari 27.268 jiwa bermata pencaharian petani sendiri atau 3,89 % dan 18.693 jiwa atau 2,67 % bermata pencaharian sebagai buruh tani, dengan tingkat kesejahteraan sebagian besar masuk dalam ekonomi menengah ke bawah.

Meningkatkan sektor pertanian ini menjadi penting dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun mempertahankan sektor ini agar tetap diminati oleh kalangan kaum muda sebagai sebuah lapangan kerja yang mampu memberikan harapan kesejahteraan kehidupannya.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pertanian Kota Semarang, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu: **“belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Menurunnya produksi pertanian	1. Terbatasnya lahan untuk pertanian
		2. Rendahnya kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian
		3. Belum optimalnya sarana pertanian yang tersedia
		4. Potensi plasma nutfah (sumber daya genetik) yang belum dimanfaatkan secara optimal
		5. Belum optimalnya produktivitas ternak
		6. Belum optimalnya prasarana/infrastruktur pertanian yang tersedia
		7. Adanya resiko penyebaran penyakit hewan menular karena posisi Kota Semarang sebagai jalur lalu lintas ternak maupun Bahan Asal Hewan (BAH)
		8. Dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman
		9. Rendahnya kompetensi sumberdaya manusia pertanian
		10. Belum Optimalnya kinerja pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Pertanian Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.
2. Pengembangan sentra produk pertanian masih rendah.

3. Pengembangan pertanian perkotaan belum optimal, masih sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri, belum berorientasi pasar.
4. Dukungan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan masih belum optimal (sarana klinik hewan, puskesmas, BPP, pengendalian OPT, dll)
5. Tingkat produktivitas tannaman yang masih rendah dan pendapatan usaha yang relatif rendah karena kecilnya skala usaha tani.
6. Perlindungan terhadap bencana/kegagalan usaha (asuransi pertanian) masih rendah.
7. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan carrying capacity.
8. Sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.
9. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), serta gangguan reproduksi ternak sehingga produktivitas ternak relatif rendah.
10. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan serta akses untuk memperoleh modal, informasi, teknologi dan sarana prasarana
11. Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian mengalami penurunan.
12. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani.
13. Terbatasnya jumlah ASN baik fungsional penyuluh maupun fungsional teknis terutama yang berlatar belakang pertanian .

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat, Dengan Semangat Bergerak Bersama yang Berdasarkan Pancasila, Dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) misi berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pertanian Kota Semarang mendukung pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu: meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila, pada Tujuan 3 yaitu : meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang pertanian, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah meningkatnya produksi pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dinas Pertanian Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target meningkatnya nilai tambah ekonomi khususnya nilai tambah di sector pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mendukung visi Presiden, maka ditetapkan visi Pertanian jangka menengah yaitu: **“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi

Dalam pencapaian tujuan-tujuan diatas, Kementerian Pertanian menetapkan sasaran strategis, Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

SS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja

- peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri

SS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja :

- pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional
- persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan

SS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja :

- persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional
- persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan

SS4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja :

- persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan 7. teknologi yang diterapkan oleh pertanian

SS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja :

- indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan 9. indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan

SS6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja :

- persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani
- persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
- persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)

SS7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja :

- persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya
- persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian

SS8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja :

- nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

SS9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja :

- nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Dengan memperhatikan potensi daerah maka Dinas Pertanian Kota Semarang akan berperan serta dalam pencapaian swasembada padi dan jagung; peningkatan produksi daging; peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian; serta peningkatan pendapatan keluarga petani.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah:

1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah.
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selama periode tahunan 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.5. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) subsektor peternakan.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah selama periode tahunan 2018-2023 adalah meningkatnya produksi daging, susu dan telur, dengan indikator sasarannya adalah jumlah produksi daging, susu dan telur di Provinsi Jawa Tengah.

3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pertanian Kota

Semarang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pertanian Kota Semarang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pertanian Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang untuk kawasan peruntukan pertanian dijabarkan sebagai berikut:

1. Kawasan pertanian tanaman pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan seluas ± 2.590 ha merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari ± 626 ha Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ± 964 ha Cadangan Lahan Pertanian Pangan. Kawasan ini meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Tembalang, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, dan Tugu.

Adapun rencana pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan adalah sebagai berikut:

- a. Budidaya tanaman pangan;
- b. Peningkatan system irigasi; dan
- c. Pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau melalui peningkatan saluran irigasi.

2. Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura seluas ± 1.800 ha meliputi wilayah Kecamatan Tembalang, Gunungpati, Mijen, dan Ngaliyan. Rencana pengembangan kawasan hortikultura adalah:

- a. Budidaya tanaman hortikultura, perkebunan, dan tanaman tahunan; dan
- b. Pengembangan agroforestry.

Berdasarkan Pasal 119 (2) ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Pada kawasan tanaman pangan:

- a. Untuk budidaya tanaman pangan
- b. Dilarang budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah
- c. Boleh untuk kegiatan pendukung pertanian
- d. Dilarang pembangunan kegiatan terbangun yang tidak terkait dengan pertanian tanaman pangan

2. Pada kawasan hortikultura:

- a. Budidaya hortikultura

- b. Boleh untuk tanaman pangan
- c. Boleh untuk perkebunan atau kehutanan
- d. Boleh untuk peternakan dan perikanan
- e. Boleh pembangunan pengolah hasil pertanian dan kehutanan
- f. Boleh pemanfaatan ruang untuk rumah petani.

3.7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan penambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu poin penting dalam penyusunan KLHS adalah melihat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hasil identifikasi Indikator TPB Kota Semarang Tahun 2019 sebanyak 174 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, jumlah indikator yang telah dilaksanakan sebanyak 118 indikator atau 68% telah mencapai target TPB yang ditetapkan oleh Kota Semarang melalui forum RAD SDG's. Sedangkan sebanyak 31 indikator atau 18% diantaranya belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu sebanyak 25 indikator atau 14% memiliki isu data berupa ketiadaan data yang valid maupun ketiadaan sumber daya data.

Pelaksanaan capaian indikator TPB dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan Hidup dan Pilar Hukum dan Tata Kelola. Berikut rincian capaian TPB dan Isu Strategis di setiap pilar pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah terkait pada Pilar Sosial dengan sasaran strategis dalam pengentasan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pendidikan dan kesetaraan gender. Pada isu kemiskinan, sasaran strategis yang utama adalah peningkatan penganggaran bantuan penanggulangan kemiskinan seperti bansos, PKH dan subsidi gaji serta lainnya. Hal ini karena kondisi pandemik menyebabkan probabilitas peningkatan tingkat kemiskinan sehingga perlu adanya bantuan penghidupan.

Tabel 3.1
Isu Strategis TPB Kota Semarang – Pilar Sosial

MASALAH	MASALAH STRATEGIS	ISU STRATEGIS
Penduduk miskin di Kota Semarang mencapai 13,8 % sementara Capaian Nasional 9,22 %	kemiskinan berkembang pada permukiman kumuh	Kemiskinan Kota
Kawasan pesisir dimana sebaran permukiman kumuh terkonsentrasi terkena banjir dan rob serta amblesan tanah	Adanya ancaman banjir dan rob	
Pandemi berakibat pada Pembatasan kegiatan masyarakat yang berimplikasi pada penurunan penghasilan sektor informal yang dijalankan masyarakat menengah ke bawah	Covid menghilangkan atau menurunkan sumber penghasilan masyarakat	
Cakupan penduduk miskin penerima PKH lebih rendah dari capaian nasional yaitu 5,68 %	Anggaran PKH dan Bansos yang tidak merata	
Belum adanya data konsumsi dan ketahanan pangan di Kota Semarang	Produksi pangan pada lahan yang terbatas tidak sebanding dengan kebutuhan pangan	Akses dan ketersediaan pangan yang murah dan berkualitas
Penurunan penghasilan dan hilangnya pencaharian karena pandemik menyebabkan sulitnya masyarakat mengakses bahan pangan yang berkualitas	Covid menurunkan penghasilan, sehingga konsumsi masyarakat terganggu	
Tingginya kasus penyakit berat seperti TBC dan Hepatitis serta Hipertensi dengan penanganan yang masih rendah	Prosedur penanganan lebih lama dan lebih mahal mengingat harus melalui protocol covid	Pelayanan Kesehatan dan pengobatan yang murah dan berkualitas
Penggunaan obat rasional di fasilitas Kesehatan terutama di puskesmas masih belum mencapai 90 %	Kurangnya ketersediaan obat dan vaksin yang terjangkau oleh masyarakat miskin	
Cakupan SD dan SMP terakreditasi A belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2019	Menurunnya kualitas Pendidikan karena pandemi	Penyelenggaraan Pendidikan yang mudah diakses, Merata dan berkualitas
Alat peraga dan praktikum yang kurang	Pembelajaran Daring membatasi akses siswa terhadap laboratorium sekolah	
Masyarakat miskin kesulitan melakukan pembelajaran daring karena ketiadaan sarana		
Angka Partisipasi Murni SD sederajat lebih rendah dari capaian nasional pada tahun 2019	Tingginya biaya Pendidikan di Kota Semarang	Kesejahteraan Keluarga
Belum adanya pendataan terkait dengan jumlah dan prevalensi angka merokok pada anak	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	
Rasio KDRT lebih tinggi dari target yang ditetapkan tahun 2019	Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi	
Covid mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga, imbas dari penurunan ini adalah memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak		

Selain itu, sasaran utama lain adalah pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi kreatif berbasis IT. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat tanpa interaksi langsung. Pada isu ketersediaan pangan, sasaran strategis yang muncul ialah peningkatan upaya intensifikasi pertanian melalui pertanian perkotaan atau urban farming dan penyediaan pangan yang terjangkau. Urban farming diperlukan sebagai upaya membantu pemenuhan

kebutuhan bahan pangan tertentu secara mandiri oleh kelompok masyarakat. Hal ini penting untuk mengurangi pengeluaran karena konsumsi. Selain usaha masyarakat, penyediaan pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah melalui sasaran penyediaan pangan yang mudah dan terjangkau dari segi harga serta berkualitas.

Tabel 3.2
Sasaran Strategis TPB Kota Semarang – Pilar Sosial

PERMASALAHAN STRATEGIS	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
kemiskinan berkembang pada permukiman kumuh	Kemiskinan Kota	Penurunan kemiskinan
Adanya ancaman banjir dan rob		Peningkatan Kapasitas Menghadapi Banjir
Covid menghilangkan atau menurunkan sumber penghasilan masyarakat		Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis IT
Anggaran PKH dan Bansos yang tidak merata		Pemerataan Dan Peningkatan PKH dan Bansos
Produksi pangan pada lahan yang terbatas tidak sebanding dengan kebutuhan pangan	Akses dan ketersediaan pangan yang murah dan berkualitas	Inensifikasi Pertanian Perkotaan (<i>Urban Farming</i>)
Covid menurunkan penghasilan, sehingga konsumsi masyarakat terganggu		Bantuan Penyediaan Pangan yang Terjangkau
Prosedur penanganan lebih lama dan lebih mahal mengingat harus melalui protocol covid	Pelayanan Kesehatan dan pengobatan yang murah dan berkualitas	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kurangnya ketersediaan obat dan vaksin yang terjangkau oleh masyarakat miskin		Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin yang terjangkau oleh masyarakat miskin
Menurunnya kualitas Pendidikan karena pandemi	Penyelenggaraan Pendidikan yang mudah diakses, Merata dan berkualitas	Peningkatan kualitas pendidik dalam pembelajaran daring
Pembelajaran Daring membatasi akses siswa terhadap laboratorium sekolah		Penyediaan alat peraga dan praktikum yang efektif dan efisien
		Bantuan penyediaan sarana minima pembelajaran daring
Tingginya biaya Pendidikan di Kota Semarang		Bantuan biaya pendidikan bagi siswa (non operasional sekolah)
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi		Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Peningkatan pelayanan berkaitan dengan kesejahteraan keluarga

3.8. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

1. Dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19
2. Keterbatasan lahan pertanian
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pertanian
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan
5. Daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan sebagai produl unggulan lokal masih harus ditingkatkan.
6. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
7. Fungsi kelembagaan pertanian belum optimal.
8. Masih adanya potensi paparan zoonosa maupun penyakit hewan menular strategis lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kota Semarang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Pertanian Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Semarang

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang pertanian. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pertanian Kota Semarang. Adapun tujuan Pertanian Kota Semarang untuk periode 2021-2026 adalah “**meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian**”. Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019/2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB			0,79%	0,792%	0,794%	0,796%	0,798%	0,800%
			1. Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	1. Jumlah produksi pertanian	85.568,44 ton	86.066,87 ton	86.569,76 ton	87.077,23 ton	87.588,22 ton	88.105,73 ton
			2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	1. Nilai AKIP Dinas Pertanian	71,84	72	72,2	72,4	72,6	72,8

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Semarang

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pertanian mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

4.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut.

4.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pertanian Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan produksi melalui penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen serta perluasan pasar produksi hasil pertanian	Peningkatan prasarana pertanian melalui penambahan/ rehabilitasi infrastruktur pertanian	Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian
	Peningkatan sarana pertanian melalui penggunaan teknologi yang tepat guna, pemanfaatan sumber daya genetik untuk mengembangkan keragaman genetik varietas lokal, serta pembukaan pasar melalui promosi pemasaran	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan & Tumbuhan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan & Tumbuhan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan & Tumbuhan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan & Tumbuhan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan & Tumbuhan
	Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan bibit berkualitas, penerapan teknologi inseminasi buatan, serta penguatan pakan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan
		Pengawasan Obat Hewan	Pengawasan Obat Hewan	Pengawasan Obat Hewan	Pengawasan Obat Hewan	Pengawasan Obat Hewan
		Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Penyediaan Benih/ ibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
Meningkatkan status kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular serta penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Penjaminan kesehatan hewan serta pencegahan & penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis	Penjaminan kesehatan hewan serta pencegahan & penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis	Penjaminan kesehatan hewan serta pencegahan & penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis	Penjaminan kesehatan hewan serta pencegahan & penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis	Penjaminan kesehatan hewan serta pencegahan & penanggulangan penyakit hewan menular dan zoonosis

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Penguatan kelembagaan pertanian	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian dan kemandirian petani	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
Meningkatkan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman	Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim dan organisme pengganggu tanaman	Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Pengendalian dan Penanggulangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pertanian	Peningkatan perencanaan & evaluasi kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Peningkatan administrasi & pelaporan keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Administrasi Umum dan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum dan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum dan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum dan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum dan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	1. Meningkatnya mutu, produksi, dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan	1.1. Meningkatkan produksi melalui penguatan sistem budidaya dan penanganan pascapanen serta perluasan pasar produksi hasil pertanian	1.1.1. Peningkatan prasarana pertanian melalui penambahan/rehabilitasi infrastruktur pertanian 1.1.2. Peningkatan sarana pertanian melalui penggunaan teknologi yang tepat guna, pemanfaatan sumber daya genetik untuk mengembangkan keragaman genetik varietas lokal, serta pembukaan pasar melalui promosi pemasaran 1.1.3. Peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan bibit berkualitas, penerapan teknologi inseminasi buatan, serta penguatan pakan
		1.2. Meningkatkan status kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1.2.1. Pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular serta penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)
		1.3. Penguatan kelembagaan pertanian	1.3.1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pertanian dan kemandirian petani
		1.4. Meningkatkan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman	1.4.1. Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim dan organisme pengganggu tanaman

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
	2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	2.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pertanian	2.1.1. Peningkatan perencanaan & evaluasi kinerja 2.1.2. Peningkatan administrasi & pelaporan keuangan 2.1.3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pertanian Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang disusun dalam rangka melaksanakan pembangunan pada Misi (2) potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila, dimana Dinas Pertanian berperan pada program-program prioritas yang terkait bidang pertanian, sebagai berikut:

- A. Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal, yaitu pada prioritas pada:
1. Gelar Hidropinik;
 2. Pengembangan Urban Farming melalui fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit;
 3. Pengembangan Kampung Tematik, yaitu berupa dukungan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian;

4. Pengembangan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) melalui fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada usaha-usaha berbasis hewan/ternak.
- B. Program Kemitraan Usaha, dengan prioritas pada:
1. Kawasan empon-empon, yaitu melalui pendampingan pengembangan empon-empon pada kelompok tani
- C. Program Peningkatan Daya Saing Daerah, yaitu berupa dukungan operasional dan fasilitasi kegiatan pertanian pada Semarang Technopark.

Selain berperan dalam pelaksanaan program-program prioritas Misi 2 di atas, Dinas Pertanian juga turut mendukung dalam pelaksanaan Misi (4) mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota, yaitu pada program prioritas:

- A. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yaitu dengan fasilitasi bibit tanaman untuk *vertical and roof garden/farming*.
- B. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), yaitu berupa dukungan bibit tanaman keras dalam pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo.

Program-program prioritas pada Misi (2) RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang diintegrasikan dalam program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang, yang rinciannya terdapat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2021-2026 Bidang Urusan Pertanian

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian		Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB				persen	0,79	0,792	23.418.815	0,794	24.025.521	0,796	25.401.029	0,798	27.732.573	0,80	36.547.553
	Meningkatnya mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian				ton	85.568,44	86.066,87	6.181.447	86.569,76	6.426.039	87.076,23	6.907.873	87.588,22	8.260.118	88.105,73	11.467.775
			3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.611.721		604.677		322.130		628.875		3.108.015
					Produktivitas pertanian per ha per tahun	ton/ha	6,38	6,38	1.611.721	6,38	604.677	6,38	322.130	6,38	628.875	6,38	3.108.015
			3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian					200.000		0		0		100.000		0

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	dokumen	2	3	200.000	0	0	0	0	1	100.000	0	0
			3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B					0		0			0	100.000		0
					Jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yg disusun	dokumen	0	0	0	0.00	0	0.00	0	1	100.000	0	0
			3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya					100.000		0			0			0

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yg disusun	dokumen	2	2	100.000	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
			3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan					100.000		0		0		0	0	
					Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yg disusun	dokumen	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
			3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian					1.411.721		604.677		322.130		528.875	3.108.015	
					Jumlah prasarana pertanian yg dibangun/direhab	unit	40	28	1.411.721	4	604.677	1	322.130	3	528.875	25	3.108.015

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
			3.27.03.2. 02.01	Pembangu nan, Reha- bilitasi dan Pemelihara an Jaringan Irigasi Usaha Tani					100.000		0		0		150.000		450.000
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg diba- ngun/direhab	unit	2	3	100.000	0.00	0	0.00	0	1	150.000	3	450.000
			3.27.03.2. 02.02	Pembangu nan, Reha- bilitasi dan Pemelihara an Embung Pertanian					120.000		0		0		0		185.000
					Jumlah embung yg dibangun/ direhab	unit	1	2	120.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1.00	185.000
			3.27.03.2. 02.03	Pembangu nan, Reha- bilitasi dan Pemelihara an Jalan Usaha Tani					100.000		294.678		0		0		500.000
					Jumlah jalan pertanian yg dibangun/dir ehab	unit	5	1	100.000	2	294.678	0	0	0	0	3	500.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
			3.27.03.2. 02.04	Pembangu nan, Reha- bilitasi dan Pemelihara an DAM Parit					0		0		0		0		0
					Jumlah dam parit yg dibangun/dir ehab	unit	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3.27.03.2. 02.08	Pembangu nan, Reha- bilitasi dan Pemelihara an Balai Penyuluh di Kecamatan serta sara- na pendu- kungnya				0		0		0		0		100.000	
					Jumlah BPP yg direhab	unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Jumlah sarana pendukung penyuluhan di BPP	paket	3	0	0	0	0	0	0	0	3	100.000	
			3.27.03.2. 02.09	Pembangun- an, Reha- bilitasi dan Pemeliharaa an Prasa-rana Pertanian Lainnya				1.091.721		309.999		322.130		378.875		1.873.015	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/dir ehab	unit	26	22	1.091.721	2	309.999	1	322.130	2	378.875	15	1.873.015
			3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.746.326		4.920.304		5.492.384		6.201.999		6.131.400
					Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	ton	50.233,44	50.439,36	3.287.400	50.647,76	4.238.699	50.857,23	4.310.399	51.069,22	4.306.678	51.283,73	3.802.854
			3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian					1.515.522		1.986.299		2.218.155		2.240.000		1.968.574
					jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	kelompok	0	30	1.515.522	25	1.986.299	29	2.218.155	28	2.240.000	38	1.968.574
			3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,					530.522		864.385		1.023.155		990.000		838.574

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
				Teknologi dan Spesifik Lokasi													
					Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	ha	12	21,2	240.522	10	480.385	10	480.155	10	390.000	15	338.574
					Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon- empon	kelompok	0	5	150.000	4	200.000	6	250.000	8	300.000	8	200.000
					Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	kelompok	0	2	40.000	0	0	2	75.000	2	100.000	4	100.000
					Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	kelompok	0	5	100.000	2	184.000	4	218.000	4	200.000	8	200.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
			3.27.02.2. 01.02	Pendampin- gan Peng- gunaan Sarana Pendukung Pertanian					985.000		1.121.914		1.195.000		1.250.000		1.130.000
					jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	paket	16	18	200.000	16	200.000	16	200.000	16	200.000	16	200.000
					jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaat-an alsintan/nak	kelompo k	0	10	125.000	3	170.000	5	125.000	5	150.000	5	150.000
					jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	kelompo k	3	12	100.000	2	100.000	4	200.000	2	100.000	3	100.000
					Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	batang	20.000	13.000	200.000	22.000	220.000	30.000	300.000	40.000	400.000	30.000	300.000
					Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	kegiatan	4	3	150.000	3	161.914	3	200.000	3	200.000	3	200.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah pengembangan tanaman sukun	batang	5.500	110	110.000	100	170.000	100	70.000	100	100.000	100	80.000
					Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	kali	0	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000
			3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					1.771.878		2.252.400		2.092.244		2.066.678		1.834.280
					Persentase kebun dinas yang produktif	persen	62,50	62,50	1.771.878	62,50	2.252.400	68,75	2.092.244	75,00	2.066.678	87,50	1.834.280
			3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					1.771.878		2.252.400		2.092.244		2.066.678		1.834.280
					Jumlah kebun dinas yang dikelola	unit	14	16	1.746.878	16	2.227.400	16	1.992.244	16	1.966.678	16	1.659.280

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	batang	0	500	25.000	500	25.000	1.000	50.000	1.000	50.000	1.000	75.000
					Jumlah pohon induk yang dihasilkan	pohon	0	0	0	0	0	0	0	0	500	50.000	
					jumlah sertifikat Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yg diperoleh	dokumen	0	0	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000
					produksi hasil peternakan	ton	35-335	35.627,50	458.926	35.922,00	681.605	36.219,00	1.181.985	36.519,00	1.895.321	36.822,00	2.328.546
			3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten /Kota				15.000		25.000		30.000		30.000		60.000	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	persen	0	40	15.000	45	25.000	50	30.000	60	30.000	65	60.000
			3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					15.000		25.000		30.000		30.000		60.000
					Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	laporan	0	12	5.000	12	5.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000
					Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	kelompok	0	9	10.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	5	50.000
			3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer					25.000		25.000		25.000		25.000		25.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	persen	0	100.00	25.000	100.00	25.000	100.00	25.000	100.00	25.000	100.00	25.000
			3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan					25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
					Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	toko	0	36	25.000	18	25.000	18	25.000	18	25.000	18	25.000
			3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain					418.926		631.605		1.126.985		1.840.321		2.243.546

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	ekor	128	100	418.926	70	631.605	75	1.126.985	100	1.840.321	100	2.243.546
			3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten /Kota Lain					418.926		631.605		1.126.985		1.840.321		2.243.546
					Jumlah ternak yang diadakan	ekor	128	100	403.926	70	616.605	75	1.111.985	100	1.825.321	100	2.228.546
					Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	kecamatan	0	16	15.000	16	15.000	16	15.000	16	15.000	16	15.000
			3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					279.000		307.189		367.189		447.000		942.824

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-5	-5	279.000	-5	307.189	-5	367.189	-5	447.000	-5	942.824
			3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota				179.000		197.189		217.189		297.000		742.824	
					Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	kelurahan	15	15	179.000	14	197.189	14	217.189	14	297.000	13	742.824
			3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				179.000		197.189		217.189		297.000		742.824	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	kali	55	25	112.000	25	117.189	25	137.189	30	149.278	60	184.169
					Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	ekor	10.000	3.500	67.000	3.500	80.000	3.500	80.000	5.000	147.722	11.000	558.655
			3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner					100.000		110.000		150.000		150.000		200.000
					Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	persen	90	90	100.000	92	110.000	94	150.000	94	150.000	95	200.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
			3.27.04.2 .04.02	Pengawasa n Peredaran Hewan dan Produk Hewan					100.000		110.000		150.000		150.000		200.000
					persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	persen	100	100	50.000	100	60.000	100	100.000	100	100.000	100	150.000
					Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	persen	100	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000
			3.27.07	PROGRAM PENYULUH AN PERTANIA N					469.400		504.840		601.170		868.215		1.085.536
					Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	kelompo k	24	26	469.400	28	504.840	31	601.170	33	868.215	36	1.085.536
			3.27.07.2. 01	Pelaksanaa n Penyuluha n Pertanian					469.400		504.840		601.170		868.215		1.085.536

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	persen	30	35	469.400	40	504.840	50	601.170	55	868.215	65	1.085.536
			3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					55.000		55.000		80.000		60.000		120.000
					Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang difasilitasi	kegiatan	0	1	5.000	1	5.000	2	10.000	2	10.000	3	20.000
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	lembaga	5	5	50.000	5	50.000	5	70.000	5	50.000	5	100.000
			3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					364.400		399.840		446.170		733.215		865.536

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	kelompok	0	5	254.400	5	279.840	5	307.824	5	323.215	5	405.536
					Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	252	300	100.000	100	100.000	100	118.346	200	400.000	200	400.000
					Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	kegiatan	0	1	10.000	2	20.000	2	20.000	1	10.000	4	60.000
			3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					50.000		50.000		75.000		75.000		100.000
					persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	persen	100	100	50.000	100	50.000	100	75.000	100	75.000	100	100.000
			3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					75.000		89.029		125.000		114.029		200.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	%	0	75	75.000	75	89.029	80	125.000	80	114.029	85	200.000
			3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					75.000		89.029		125.000		114.029		200.000
					Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	kelompok	0	7	75.000	5	89.029	7	125.000	7	114.029	11	200.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
			3.27.05.2. 01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					50.000		64.029		75.000		64.029		125.000
				Jumlah kelompok yg mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	kelompok	0	4	50.000	3	64.029	3	75.000	3	64.029	5	125.000	
			3.27.05.2. 01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				25.000		25.000		50.000		50.000		75.000	
				Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	kelompok	0	3	25.000	2	25.000	4	50.000	4	50.000	6	75.000	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
	Meningkat nya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian					71.84	72.00	17.237.368	72.20	17.599.482	72.40	18.493.156	72.60	19.472.455	72.80	25.079.778
			3.27.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA					17.237.368		17.599.482		18.493.156		19.472.455		25.079.778
					Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	100	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	11.000	100	10.000
			3.27.01.2. 01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000		10.000		10.000		11.000		10.000
					Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	dokume n	27	26	10.000	26	10.000	26	10.000	27	11.000	26	10.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
			3.27.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000		5.000		5.000		6.000		5.000
					Jumlah Dokumen perencanaan	dokumen	6	5	5.000	5	5.000	5	5.000	6	6.000	5	5.000
			3.27.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
					Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	dokumen	21	21	5.000	21	5.000	21	5.000	21	5.000	21	5.000
					Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	%	100	100	14.732.568	100	15.085.482	100	15.829.456	100	16.610.629	100	17.480.860
			3.27.01.2. 02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah					14.732.568		15.085.482		15.829.456		16.610.629		17.480.860
					Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	dokumen	4	4	6.000	4	6.000	4	6.000	4	6.000	4	6.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
			3.27.01.2. 02.05	Koordinasi &Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
					Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500
			3.27.01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD					3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
					Jumlah Laporan keuangan semesteran	dokumen	2	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000
			3.27.01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
					Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	dokumen	1	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	persen	100	100	14.726.568	100	15.079.482	100	15.823.456	100	16.604.629	100	17.474.860
			3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					14.516.568		14.879.482		15.623.456		16.404.629		17.224.860
					Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	persen	100	100	14.516.568	100	14.879.482	100	15.623.456	100	16.404.629	100	17.224.860
			3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					210.000		200.000		200.000		200.000		250.000
					Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	persen	100	100	210.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	250.000
					Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	100	100	2.494.800	100	2.504.000	100	2.653.700	100	2.850.826	100	7.588.918
			3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					689.000		757.000		802.000		858.000		888.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	persen	100	100	689.000	100	757.000	100	802.000	100	858.000	100	888.000
			3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					35.000		40.000		40.000		45.000		45.000
					Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	10	10	35.000	10	40.000	10	40.000	10	45.000	10	45.000
			3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					230.000		230.000		240.000		240.000		250.000
					Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	31	30	230.000	30	230.000	30	240.000	30	240.000	30	250.000
			3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					57.000		60.000		60.000		65.000		65.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	jenis	11	11	57.000	11	60.000	11	60.000	11	65.000	11	65.000
			3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pera-turan Perundang-undangan					7.000		7.000		7.000		8.000		8.000
					Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Jenis	0	3	7.000	3	7.000	3	7.000	3	8.000	3	8.000
			3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					60.000		60.000		75.000		100.000		100.000
					Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	persen	100	100	60.000	100	60.000	100	75.000	100	100.000	100	100.000
			3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000		160.000		180.000		200.000		220.000
					Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	persen	100	100	100.000	100	160.000	100	180.000	100	200.000	100	220.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
			X.XX.01.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD					200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
					Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	jenis	10	14	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000
			3.27.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					200.000		126.000		133.200		150.000		2.495.804
					Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	persen	100	100	200.000	100	126.000	100	133.200	100	150.000	100	2.495.804
			3.27.01.2. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0		0		0		0		668.250

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah mobil kepala dinas yang diadakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	668.250
			3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0	0	0	0	0	0	0	0		1.477.554
					Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1.477.554
			3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				150.000	76.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000
					Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	jenis	7	4	150.000	3	76.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000
			3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000	50.000	83.200	100.000	100.000	100.000	100.000			300.000
					Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	jenis	9	5	50.000	3	50.000	3	83.200	3	100.000	5	300.000
			3.2701.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				934.000	981.000	1.028.500	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000			1.125.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	persen	100	100	934.000	100	981.000	100	1.028.500	100	1.076.000	100	1.125.000
			3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					180.000		200.000		220.000		240.000		260.000
					Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	persen	100	100	180.000	100	200.000	100	220.000	100	240.000	100	260.000
			3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					754.000		781.000		808.500		836.000		865.000
					Persentase layanan umum kantor yang disediakan	persen	100	100	754.000	100	781.000	100	808.500	100	836.000	100	865.000
			3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					671.800		640.000		690.000		766.826		3.080.114

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Persentase Pemeliharaan aset OPD	persen	100	100	671.800	100.00	640.000	100.00	690.000	100.00	766.826	100.00	3.080.114
			3.27.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Peme- liharaan, Biaya Peme- liharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
					Jumlah penyedia- aan jasa pemeliharaan, biaya pemeli- haraan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	unit	1	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000
			3.27.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Peme- liharaan, Biaya Peme- liharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000		350.000		350.000		350.000		450.000	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5	
								Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)	Target	Rp. (1.000)
					Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	unit	55	55	350.000	55	350.000	55	350.000	55	350.000	67	450.000
			3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya					100.000		100.000		125.000		150.000		200.000
					Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	jenis	9	9	100.000	9	100.000	10	125.000	10	150.000	10.00	200.000
			3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					181.800		150.000		175.000		226.826		2.390.114
					Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	gedung	11	9	181.800	9	150.000	9	175.000	9	226.826	10	2.390.114
JUMLAH									23.418.815		24.025.521		25.401.029		27.732.573		36.547.553

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kota Semarang yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton/ha	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	44,49	5	5	5	5	5	5
3	Sentra produk unggulan pertanian	Kawasan	4	4	5	6	7	7	7
4	Jumlah kawasan pertanian perkotaan	Kelurahan	101	117	132	147	162	177	177
5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	75	75	75	80	80	85	85
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	75	75	81,25	81,25	81,25	87,5	87,5

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pertanian Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, urusan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026. Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertanian Kota Semarang.

Permasalahan pertanian sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pertanian Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai

satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan urusan pertanian secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.